



Terkait Sisa Dana Hibah Pilkada Buleleng 2017 Bawaslu Bali Tegaskan Sudah Mengembalikan

DENPASAR, NusaBali

Terkait berita pengembalian sisa dana hibah Pilkada Buleleng 2017, Bawaslu Bali menegaskan sudah mengembalikan seluruh sisa dana hibah pilkada 2017. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, usai menggelar rapat dengan mantan pengawas Pilkada Buleleng 2017 beserta jajaran kesekretariatan di kantor Bawaslu Bali, Rabu kemarin.

Menurut Rudia, dana hibah pilkada Buleleng 2017 berjumlah Rp 10.210.211.157. Hingga selesai seluruh tahapan, dana yang terserap sebesar Rp 7.515.578.731. Sisa dana yang tidak terserap Rp 2.694.632.426. "Serapannya mencapai 73,61 %. Sisa anggaran tersebut sudah semua kami kembalikan. Kami sudah menerima pengesahan pengembalian dana hibah dari kementerian keuangan. Tanggal 27 April sudah disetor ke Kas Daerah," jelas Rudia.

Ditegaskan lagi, hibah pilkada masuk ke DIPA Bawaslu RI melalui mekanisme NPHD. Setelah itu terregistrasi di Kementerian Keuangan baru digunakan oleh

Panwas.

Menyinggung banyaknya dana yang dikembalikan, Rudia menjelaskan sejumlah komponen biaya pilkada memang tidak bisa dcairkan. Salah satunya komponen biaya Sentra Gakkumdu dan Sengketa.

"Itu anggarannya sangat besar, karena sengketa dan penanganan pidana pemilu tidak banyak, ya anggarannya tidak bisa diserap," jelas Rudia. Berkaitan dengan arsip-arsip pilkada, semua arsip telah diserahkan ke arsip Pemkab Buleleng, termasuk dokumen pertanggungjawaban keuangan.

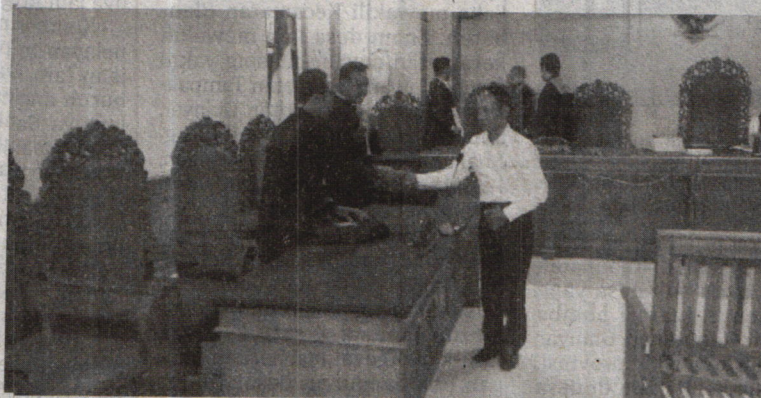
Sebelumnya diberitakan Pemkab Buleleng belum bisa memastikan sisa dana Pilkada Buleleng 2017 yang diberikan kepada penyelenggara, pengawas dan pihak keamanan. Pemkab masih tunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan dana hibah tersebut. Dana Pilkada yang diberikan dalam bentuk hibah sebesar Rp 76,9 miliar. Rinciannya untuk KPU Buleleng sebesar Rp 40,2 miliar, Panwas Pemilihan Pilkada sebesar Rp 10,2 miliar, dan TNI/Polri Rp 14,8 miliar. **sur**

Edisi : Kamis, 18 Mei 2017

Hal : 15



Kasus Korupsi Perdin DPRD Denpasar Hakim Tunjuk Pengacara untuk Rai Sutha



• NUSABALI/REZA

TERDAKWA, I Gusti Agung Rai Sutha salami tim JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (10/5) lalu.



• IST

I Made Suardika Adnyana.

DENPASAR, NusaBali

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Agung Rai Sutha, 60, yang sebelumnya nekat maju tanpa pengacara dalam sidang dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar akhirnya mendapat pendampingan hukum. I Made Suardika Adnyana, ditunjuk majelis hakim untuk mendampingi Rai Sutha sebagai kuasa hukum.

Hal ini dibenarkan Suardika saat ditemui di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (17/5). Ia mengatakan ditunjuk majelis hakim untuk mendampingi Rai Sutha dalam perkara korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar. "Ya. Saya yang ditunjuk jadi kuasa hukum Pak Rai Sutha," terang mantan wartawan ini.

Namun rencana pertemuan Suardika dan Rai Sutha di Pengadilan Tipikor pada, Rabu kemarin batal terjadi. Pasalnya, Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung tidak memberikan ijin Rai Sutha keluar Lapas karena tidak ada pengawalan. "Katanya polisi yang biasa ngawal tahanan diperiksa. Jadi tidak ada pengawalan dan Pak Rai Sutha tidak bisa sidang," ujar Suardika.

Seperti diketahui, kengototan Rai Sutha maju sidang tanpa didampingi pengacara ditunjukkan dalam sidang perdana pada, Rabu (10/5) lalu di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila didampingi hakim anggota Sutrisno dan Nurbaya Gaol. Saat itu hakim Sukanila menanyakan kuasa hukum yang akan mendampingi Rai Sutha dalam sidang.

Namun Bendesa Tangeb, Meng-

wi, Badung ini menyatakan tidak akan menggunakan kuasa hukum dan akan maju sendiri dalam persidangan. "Mohon ijin majelis, kalau boleh sidang dilanjutkan tanpa saya didampingi penasihat hukum," ujar Rai Sutha. Karena ngotot tanpa didampingi kuasa hukum, hakim melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan.

Namun majelis hakim mengingatkan, jika terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum, pada sidang selanjutnya majelis hakim akan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. "Karena ini keinginan terdakwa sidang dilanjutkan. Terkait dengan hak terdakwa nanti setelah didampingi penasihat hukum," kata hakim melanjutkan sidang.

Kengototan Rai Sutha maju tanpa kuasa hukum sudah ditunjukkan saat dilakukan pelimpahan dari Kejari Denpasar ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Saat itu, Rai Sutha malah mencabut kuasa pengacaranya, Ketut Rinata dan memilih maju sendiri.

Namun karena dalam prosedur pelimpahan tersangka harus didampingi pengacara, jaksa akhirnya menunjuk pengacara, Komang Darmayasa untuk mendampingi Rai Sutha selama pelimpahan.

Setelah itu, Rai Sutha tidak melanjutkan kuasa pengacara tersebut. Dalam kasus ini, eks PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Made Patra sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini berawal dari adanya program peningkatan kapasitas lembaga DPRD pada 2013 yang salah satunya terdapat anggaran perjalanan dinas (Perdin). Dalam program ini dianggarkan Rp 12.263.641.875. Ada dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp 2.292.268.170 dalam kasus ini. rez

Edisi : Kamis, 18 Mei 2017.

Hal : 5



Dewan Sayangkan Gagalnya Proses Tender Pembangunan Pasar Badung

DENPASAR, NusaBali

Proyek pembangunan Pasar Badung di Jalan Gajah Mada, Denpasar, dipastikan bakal tertunda. Proyek yang direncanakan mulai dibangun pada bulan Juni 2017 itu ternyata mengalami gagal tender. Dari 78 kontraktor yang mendaftar, dan 15 kontraktor yang mengajukan penawaran, semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal itu sangat disayangkan oleh anggota Komisi III DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra.

Menurut Susruta, gagal tender Pasar Badung ini akan melukai perasaan para pedagang yang sudah menanti-nanti pembangunan pasar terbesar di Bali ini. "Pedagang yang sudah terlanjur dijanjikan akan mendapatkan tempatnya kembali sesegera mungkin tentu kecewa. Keinginan pedagang tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen atau janji pemerintah. Tertundanya pembangunan pasar Badung tentu membuat kecewa," ujar Susruta di Denpasar, Senin (15/5).

Politisi Demokrat asal Gerenceng Denpasar ini juga menyayangkan sikap Pemerintah Kota Denpasar yang menjadikan pembangunan Pasar Badung sebagai fokus pembangunan di tahun 2017 ini. Akibatnya hampir seluruh anggaran dikonsentrasikan untuk pem-


angunan Pasar Badung, dengan mengabaikan proyek-proyek pembangunan lain yang tentunya juga sangat penting untuk pelayanan kepada masyarakat kota Denpasar.

"Sejak awal saya sudah tidak sepakat kalau anggaran hanya difokuskan untuk menggarap Pasar Badung saja. Sementara proyek pembangunan fisik lainnya diabaikan. Akibat anggaran terkonsentrasi hanya di Pasar Badung maka bisa dilihat hingga saat ini hampir tidak adanya pembangunan fisik digarap tahun 2017 ini. Semestinya proyek berjalan beriringan sehingga ketika ada proyek gagal tender maka pembangunan lain tetap masih bisa berjalan. Nah kalau sekarang, Pasar Badung gagal tender, proyek lain tidak ada. Perbaikan jalan tidak ada. Ujung-ujungnya masyarakat jadi korban," ujarnya.

Terkait kondisi tertundanya pembangunan Pasar Badung dengan waktu yang mepet di tahun 2017 ini, Ketua Fraksi Demokrat ini menyarankan agar pembangunan dilaksanakan bertahap atau multiyear. Sehingga pembangunan tetap dilaksanakan meski tidak selesai sepenuhnya. "Mestinya proyek digarap bertahap sehingga pembangunan lebih cepat selesai. Artinya bisa dijalankan pembangunan dasarnya dulu. Kemudian

tahap dua atau finishing dilanjutkan tahun berikutnya. Kalau dipaksakan harus selesai dalam satu kali anggaran rasanya tidak mungkin," tandasnya

Berdasarkan informasi terbuka dalam situs Eproc.denpasarkota.go.id, sedikitnya ada 78 kontraktor yang melakukan pendaftaran lelang proyek Pasar Badung. Dari 78 kontraktor tersebut, Pemerintah Kota Denpasar melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Denpasar, telah menetapkan lima besar. Lima kontraktor yang sebelumnya masuk lima besar itu antara lain PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (persero), PT Amarta Karya (persero), PT Tunas Jaya Sanur, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

Dari lima besar itu, tercatat pada situs tersebut kontraktor yang melakukan penawaran terendah dan yang sempat disebut-sebut bakal jadi pemenang adalah PT Adhi Karya dengan nilai penawaran Rp. 136.336.552.000. Namun, ternyata dalam proses evaluasi dan verifikasi, PT Adhi Karya pun gugur karena dinyatakan ada beberapa item persyaratan yang tidak sesuai ketentuan terkait Dokumen Pemilihan dan Adendum Dokumen Pemilihan.  cr63

Edisi : Selasa, 16 Mei 2017

Hal : 3



PEMROV BALI



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

BERMASALAH: Objek wisata GWK yang sebagian lahannya milik Pemprov Bali diduga bermasalah.

Giliran Aset di GWK Diduga Bermasalah

DENPASAR - Nasib aset Pemprov Bali yang ditengarai raib ternyata cukup banyak. Jika sebelumnya pansus aset fokus pada aset di kawasan ITDC dan Hyatt Bali, kini pansus menambah satu objek penyelidikan. Objek tersebut yakni aset berada di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK). "Kami sudah mencatat sejumlah kegagalan pemanfaatan aset, salah satunya di GWK," papar Ketua Pansus Aset DPRD Bali Nyoman Adnyana, saat ditemui kemarin (15/5) ■

► Baca *Giliran...* Hal 35

Kontribusi GWK Tak Maksimal

■ GILIRAN...

Sambungan dari hal 25

Apa saja kejanggalan di GWK? Dijelaskan Adnyana, kejanggalan di antaranya ketidakjelasan harga sewa lahan. Lahan Pemprov Bali di GWK yang luasnya diperkirakan 2 hektare lebih tidak memberikan kontribusi maksimal. Padahal, lahan di GWK memiliki nilai cukup tinggi. Bahkan, informasi yang dikantongi pansus, ada lahan pemprov di sekitaran GWK menjadi rebutan sejumlah pihak. Menurut Adnyana, kondisi tersebut cukup ironis.

Pemprov sebagai pemilik lahan terkesan tidak tahu nasib

aset. "Output aset harus jelas untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai dibiarkan tidur. Apalagi di kawasan Nusa Dua adalah kawasan mahal, maka aset harus diselamatkan," tandas politisi berkepal plontos itu. Ditambahkan, pansus akan turun ke lapangan langsung dalam waktu dekat. Pansus akan mencocokkan data dengan fakta di lapangan.

Selain itu, pansus juga akan memanggil pihak terkait, seperti pemerintah, penyewa lahan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Pihak ini akan kami dudukkan bersama, kami konfrontasi. Kalau ada saling bantah biar kami tahu kebe-

narannya," imbuh pria asal Bangli itu. Disinggung kinerja aset sebelumnya yang selalu mentok, Adnyana sesumbar tidak akan mengikuti jejak pansus aset sebelumnya. Dikatakan, pansus aset sebelumnya mentok karena terlalu banyak aset yang diurus, sehingga tidak fokus.

Nah, pansus sekarang bisa maksimal karena fokus mengurus tiga aset. Yakni ITDC, Hyatt Bali, dan GWK. Nilai aset pemprov di tiga lokasi tersebut mencapai triliunan rupiah. "Pokoknya lihat saja kinerja pansus yang sekarang tidak akan sama dengan sebelumnya. Kami akan total dan fokus," pungkasnya. (san/mus)

Edisi : Selasa, 16 Mei 2017

Hal : 25